KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BD0BS0DU

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 3 3 8  H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				H.4 X Final		
							- Index i indi	
A. IDENTITA	AS PENERIMA PENGH	ASILAN	YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP : 08 330 091 3 721 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : HENRI NETTA BR GINTING								
B. PPh PAS	AL 21 YANG DIPOTON	NG		1			1	
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK P		JAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2	21-402-01		757.500	757.500	0	5	37.875	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 36								
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor	Nomor : Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
	AS PEMOTONG PAJAR							
L			9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
C.3 ID Subunit Organisasi :		:		++++			_	
C.4 Tanggal :		2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.5 Nama Penandatangan :		:	HARI JUMADI					
C.6 Pernya	ataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah sa	aya isi dengan	benar dan telah saya	
			Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa d	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	